

JEJAK LANGKAH PERUBAHAN

dari Using sampai Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9:

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

JEJAK LANGKAH PERUBAHAN

dari Using sampai Indonesia

Editor:

Novi Anoegrajkti



PENERBIT OMBAK
www.penerbitombak.com

2016

**JEJAK LANGKAH PERUBAHAN
DARI USING SAMPAI INDONESIA**

Copyright©Pusat Penelitian Budaya Etnik dan Komunitas,
Lembaga Penelitian Universitas Jember, Agustus 2016

Diterbitkan oleh Pusat Penelitian Budaya Etnik dan Komunitas,
Lembaga Penelitian Universitas Jember
bekerjasama dengan Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia dan
Penerbit Ombak (**Anggota IKAPI**), 2016
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55599
Tlp. 085105019945; Fax. (0274) 620606
e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id
facebook: Penerbit Ombak Dua
www.penerbitombak.com

PO.690.07.'16

Editor:

Novi Anoegrajekti

Tata letak: Ridwan
Sampul: Dian Qamajaya

Gambar Sampul
www.google.com.sg

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

**JEJAK LANGKAH PERUBAHAN
DARI USING SAMPAI INDONESIA**

Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016
xvi + 416 hlm.; 16 x 24 cm
ISBN: 978-602-258-381-3

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Editor

Ruang Negosiasi Tradisional dan Inovasional ~ vii

Kata Pengantar Ketua HISKI Pusat

Metamorfosis Bahasa, Sastra, dan Budaya ~ x

Kata Pengantar Rektor Universitas Jember

Sastra: Jejak-jejak dan Perubahannya ~ xiv

BAGIAN PERTAMA: BAHASA MEMBANGUN MANUSIA

1. Lirik Tembang Jamu: Antara Pengenalan dan Romantisme
 - Sudartomo Macaryus ~ 1
2. Model-Model Strategi Kesantunan Berbahasa dalam Kultur Jawa
 - M. Rus Andianto ~ 16
3. Mengenalkan Bahasa Daerah Sejak Dini kepada Anak
 - Anastasia Erna Rochiyati Sudarmaningtyas ~ 46
4. Masa Depan Bahasa Madura di Kabupaten Jember: Sebuah Ancaman di Depan Mata
 - Hairus Salikin ~ 55

BAGIAN KEDUA: SASTRA DAN KESADARAN SOSIAL

1. Perubahan Sosial Berbasis Lintas Budaya: Identitas dan Ruang Negosiasi Global-Lokal
 - Novi Anoeagrajekti ~ 68
2. Nasionalisme *Fashion*: Ekspresi Identitas Pascakolonial dalam Novel Trilogi *Ronggeng Dukuh Puruk* Karya Ahmad Tohari
 - Abu Bakar Ramadhan Muhamad ~ 84
3. Memahami Sosok Perempuan: *Parasit Lajang*, *Cerita Cinta Enrico*, dan *Pengakuan Eks Parasit Lajang*
 - Endang Sri Widayati ~ 103
4. Sastra Daerah Cermin Penanaman Pendidikan Perilaku Berkarakter
 - Muji ~ 119
5. Interpretasi Tanda-tanda Realitas Sosial dalam Puisi “Marto Klungsu dari Leiden” Karya Darmanto Jatman: Sebuah Tinjauan Semiotik Sastra
 - Sunarti Mustamar ~ 128
6. Teks *Swargarohanaparwa* sebagai Model Perilaku Moralitas dalam Kehidupan Manusia
 - Asri Sundari ~ 149
7. Representasi Perempuan dalam Novel *Perempuan Berkalung Sorban* Karya Abidah El-Khalieqy dan *Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan* Karya Ihsan Abdul Qudus: Kajian Stilistika
 - Ahmad Faizi ~ 158

8. Sastra Harjendranu dan Ajaran Kesempurnaan Resi Wisrawa Kepada Dewi Sukeksi: Suatu Rekonstruksi Konsep Etika Nusantara dalam *Serat Lokapala*
 - Eko Suwargono ~ 180
9. Urgensi Sastra Berbasis Kearifan Lokal dalam Pembangunan Moral Bangsa: Kajian Sosiologi Sastra
 - Ali Imron Al-Ma'ruf ~ 204

BAGIAN KETIGA: BAHASA DAN SASTRA MEDIA EDUKASI

1. Pemanfaatan Nilai Edukasi Lagu Daerah di Indonesia dalam Pembangunan Karakter Bangsa
 - Anita Widjajanti ~ 220
2. Pengembangan Media Pembelajaran Demokratis Kooperatif dalam Pembelajaran Keterampilan Berbicara melalui Strategi Kooperatif *Think Pairs Share*
 - Arief Rijadi dan Parto ~ 232
3. Memelihara Keberdayaan Teks Dongeng melalui Pembelajaran Bahasa Indonesia Berpendekatan *Whole Language*
 - Arju Muti'ah ~ 250
4. Model Pendidikan Pesantren dalam Novel *Santri Cengkir* Karya Abidah El-Khalieq
 - Furoidatul Husniah ~ 265
5. Strategi Kontestasi Jender dalam Sastra Anak Indonesia dan Sastra Anak Terjemahan: Pola Resistensi Tokoh Perempuan di Bawah Hegemoni Kultur Patriarki
 - Supiastutik dan Dina Dyah Kusumayanti ~ 275

BAGIAN KEEMPAT: BUDAYA VERBAL DAN NONVERBAL

1. *Welas Asih*: Merefleksi Tradisi Sakral, Memproyeksi Budaya Profan
 - Heru S.P. Saputra ~ 288
2. Membincang Kembali Diskursus Bangsa dalam Novel Indonesia: Dari Etnolokalitas sampai dengan Pascanasional-Pasca-Indonesia
 - Akhmad Taufiq ~ 314
3. Revitalisasi Budaya Seni dan Sastra Cina Pasca-Orde Baru
 - Retno Winarni, Bambang Samsu Badriyanto, dan Sri Ana Handayani ~ 338
4. Mitos "Duplang Kamal-Pandak" di Lembah Gunung Argapura Jawa Timur
 - Sukatman ~ 359
5. Percumbuan antara *Danyang Buyut Cili* dengan *Barong Tuwa dalam Ritual Ider Bumi* di Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi
 - Latifatul Izzah ~ 376
6. Proses Penciptaan Film Dokumenter *Java Teak*: Kontribusi Kayu Jati bagi Masyarakat Jawa
 - Muhammad Zamroni ~ 392

INDEKS ~ 410

MEMBINCANG KEMBALI DISKURSUS BANGSA DALAM NOVEL INDONESIA: DARI ETNOLOKALITAS SAMPAI DENGAN PASCANASIONAL-PASCA-INDONESIA

Akhmad Taufiq

FKIP Universitas Jember

akhmadtaufiq1@gmail.com dan akhmadtaufiq@unej.ac.id

A. Pendahuluan

Diskursus bangsa dalam kapasitasnya sebagai ideologi dan wacana selalu saja tidak ada habis-habisnya diperbincangkan. Ia menjadi satu sisi yang tidak dapat dilepaskan dari jejaring kebudayaan. Wacana ideologi itu bahkan dapat diposisikan sebagai bagian penting dan fundamental dalam konteks kebudayaan suatu bangsa. Sebagai bagian penting dan fundamental dari konteks kebudayaan suatu bangsa, ideologi memberikan kontribusi penuh terhadap dinamika kebudayaan yang berjalan. Pada saat yang sama, ideologi tersebut memberikan pondasi bagi kebudayaan suatu bangsa itu sendiri.

Oleh karena itu, tidak selamanya ideologi tersebut dipandang sebagai wacana yang layak untuk diingkari, dikhianati, dan dicaci-maki. Sebaliknya, ia menjadi wacana yang dipandang masih relevan dan dibutuhkan dalam seluruh momen-momen penting perubahan kebudayaan. Althusser (1969: 231) misalnya, memosisikannya sebagai suatu praktik yang dijalani dalam hidup dan memiliki seperangkat kemampuan mengubah dunia material. Hal itu berarti bahwa ideologi dan wacana ideologi memiliki efektivitas dalam kapasitasnya mengintervensi perubahan kebudayaan dunia.

Althusser selanjutnya memberikan empat aspek yang menjadi inti pandangannya tentang ideologi: *pertama*, bahwa fungsi umum ideologi ialah mengonstitusi subjek; *kedua*, ideologi sebagai sesuatu yang dialami tidaklah palsu; *ketiga*, memosisikan ideologi sebagai pemahaman yang salah tentang kondisi-kondisi eksistensi yang sebenarnya dan hal itu akan menjadi palsu; dan *keempat*, ideologi berperan dalam reproduksi formasi-formasi sosial dan

relasinya dengan kekuasaan (Barker, 2005:75). Pandangan Althusser tersebut merupakan pandangan yang objektif terhadap realitas ideologi; dan sekaligus menyiratkan suatu perspektif bahwa ideologi tersebut merupakan sesuatu yang masih relevan dan efektif.

Hal itu sekaligus menepis adanya pandangan bahwa ideologi telah mandul; bahkan ideologi telah mati. Fakta yang terjadi ialah sebaliknya, bahwa ideologi selalu menjadi wacana yang relevan, dibutuhkan, dan tidak jarang diagung-agungkan oleh sebagian orang karena efektivitasnya dalam menjalankan tugas perubahan sosial-kebudayaan dan pada saat yang sama mengontrol perubahan wacana kebudayaan. Dalam hubungan seperti itulah banyak orang atau pihak yang merasa sangat berkepentingan dan tidak ingin berpisah dengan suatu ideologi tertentu.

Gramsci mengukur efektivitas ideologi tersebut dari kemampuannya dalam mengikat semua kelompok sosial yang berbeda-beda ke dalam satu wadah dan dalam peranannya sebagai pondasi atau agen bagi proses penyatuan sosial (Simon, 1999:86–87). Ia menjadi kekuatan yang mengintegrasikan dan bukan sebaliknya memfragmentasikan kelompok-kelompok yang berbeda tersebut. Ideologi dalam konteks tersebut betul-betul menjadi kekuatan yang menyatukan tadi. Sebagai kekuatan yang menyatukan, ideologi bukanlah suatu konstruksi yang nirstruktur. Sebaliknya, ideologi dibekali oleh seperangkat struktur yang mengakibatkan ideologi itu berjalan sedemikian efektif. Ia tidak jarang terkonjugsi dengan struktur kekuasaan tertentu, termasuk dalam hal struktur kekuasaan berbasis negara.

Dalam hubungannya dengan kekuasaan berbasis negara tersebut, struktur ideologi dibangun untuk semakin mengukuhkan kekuatan berbasis negara yang dipersepsikan sebagai kekuatan yang semakin *digdaya* dalam melakukan kontrol terhadap warganya, tanpa terkecuali kontrolnya terhadap konstruksi ideologi. Althusser memberikan istilah itu untuk memberikan impresi yang lebih halus yang ia sebut secara khusus sebagai perangkat ideologi negara (*state ideological apparatuses*); termasuk dalam kelompok ini ialah partai politik, sekolah, lembaga sosial-kemasyarakatan/keagamaan/peribadatan, media, keluarga, dan perkumpulan seni (Barry, 2010:192). Kelompok-kelompok itulah yang menjadi instrumen strategis bagi keberlangsungan negara untuk semakin meneguhkan jaring-jaring kuasanya.

Konsepsi ideologi kebangsaan dalam konteks tersebut jelas mendapatkan tempatnya. Perspektif Anderson (2002:8) misalnya yang memberikan dua kata

kunci untuk meletakkan pondasi teoretiknya tentang ideologi kebangsaan; yakni, *pertama*, konstruksi imajinatif sebagai konteks sosiokultural dan yang *kedua*, dalam konteks kedaulatan. Oleh karena itu, ideologi kebangsaan yang selanjutnya disebut nasionalisme tidak lepas dari konstruksi imajinatif tersebut dan pada saat yang sama terikat secara konkret pada batas-batas tertentu yang disebut bangsa secara teritorial.

Hal itu berarti bahwa membahas bangsa secara ideologis bukanlah sebagai realitas ideologis yang palsu. Ia bersifat realistis dan dinamis berhadapan dengan wilayah imajinatif suatu komunitas bangsa dan wilayah praksis teritorial suatu bangsa. Oleh karena itu, dalam bahasa Anderson (2002:11) sebetulnya keterikatan atas bangsa itu memberikan konsekuensi pada risiko atas komunitas kolektif tersebut. Risiko itu selanjutnya disebut sebagai risiko dalam kehidupan berbangsa.¹

Konstruksi kebangsaan dalam konteks demikian memiliki struktur ideologisnya sendiri; yakni, menyangkut basis wacana atas ideologi kebangsaan, seperangkat kekuatan pelaksana atau aparatus ideologi, dan realisasi dari ideologi tersebut. Dalam proses demikian, ideologi kebangsaan memiliki kesanggupan bergerak dan berkembang terus dalam pertemuan dan manifestasinya dengan berbagai momentum historis dan kultural yang pada faktanya juga terus bergerak.

Konsep bangsa sebagai momentum historis dan kultural juga otomatis bergerak. Ia akan selalu mencoba mencari bentuknya yang paling tepat dan ideal dalam konstruksinya sebagai ideologi. Narasi besar tentang bangsa dengan demikian semacam menjadi instrumen bagi perjalanan panjang konsep itu untuk menemukan fase-fasenya sendiri. Sebagai narasi besar, bangsa seperti yang dinyatakan Bhabha akan bersentuhan dengan berbagai citra dan simbol, yang dengan citra dan simbol tersebut bangsa seolah mampu hidup secara terus-menerus (Barker, 2005:261). Narasi besar tentang bangsa akan selalu dibangun dan dibangkitkan dalam ingatan kolektif kelompok kulturalnya.

Dengan demikian, bangsa akan menjadi domain yang selalu mengalami pergeseran; termasuk dalam hal ini ialah pergeseran cara pandang yang

¹ Anderson memberikan catatan sebagai akibat keterikatan komunitas kebangsaan tersebut mereka yang merasa terikat memiliki kesanggupan untuk melenyapkan nyawa orang atau merenggut nyawa sendiri, demi proses imajinasi sebagai bangsa tersebut. Kematian-kematian itu menyeret mereka ke hadapan problem pokok yang dibawa nasionalisme. Lebih lanjut, lihat Anderson (2002:11).

dipengaruhi ruas kultural dan historis. Tantangan kultural yang selalu berubah, bersamaan dengan hal itu tuntutan historis yang tidak dapat dielakkan menyebabkan bangsa tersebut tidak dapat diam di tempatnya. Ia akan mengejawantahkan diri sebagai kekuatan organis yang selalu mencari bentuk dan ruangnya. Bentuk dan ruang tersebut merupakan realitas yang baru yang dianggap dapat mendefinisikan, mengaktualisasikan, dan mengartikulasikan secara tepat, konsepsi bangsa tersebut sesuai dengan konteks kompleksitas zamannya. Perjalanan bangsa dalam perkembangannya pada masa tradisional, ketika etnisitas masih relatif dibakukan secara kultural, sampai dengan konsepsi bangsa pada masa modern ketika ada proses pembakuan politik menandai adanya fenomena tersebut.

Konsep bangsa pada titik demikian tidaklah dapat dipahami sebagai konsep yang stagnan. Sebaliknya, bangsa menjadi konsep yang terus bergerak tadi. Hal itu sebagai akibat kompleksitas persoalan, sekaligus tuntutan sejarah yang dihadapi. Proses itulah yang kemudian sering disebut sebagai proses yang menyejarah. Oleh karena itu, menghadirkan cara baca, cara memahami, dan cara memosisikan bangsa tersebut sebagai realitas yang selalu bergerak tadi merupakan suatu keniscayaan. Dengan cara itu akan terhindar dari perspektif yang salah atas realitas bangsa dengan kompleksitas persoalannya.

Lebih lanjut, dalam relasinya yang menyejarah, konsep bangsa pada akhirnya melakukan perjumpaan dengan realitas negara. Perjumpaannya dengan negara mampu menghadirkan perspektif baru, karena betapapun bangsa terkadang bersifat longgar, pada saat yang sama ketika bersentuhan dengan negara ia akan mengalami pembakuan-pembakuan politik. Pada saat demikian, konsepsi tentang bangsa akan terintegrasi dengan wacana negara itu sekaligus.

Wacana negara-bangsa (*nation-state*) pada kondisi demikian menjadi wacana baru yang modern. Konsep tersebut lebih mengacu sebagai konsep politik yang menunjuk pada aparatus administrasi yang dianggap memiliki kedaulatan atas ruang atau wilayah negara-bangsa; suatu bentuk identifikasi imajinatif dengan simbol dan wacana negara-bangsa. Oleh karena itu, konsepsi negara-bangsa bukanlah sekadar formasi politik, melainkan sebagai sistem representasi kultural tempat identitas nasional terus-menerus direproduksi sebagai tindakan diskursif (Barker, 2005:260).

Terdapat tiga sisi yang patut dicatat dalam hal ini. *Pertama*, proses produksi dan reproduksi konsep atas wacana bangsa menjadi ruang kultural yang

terbuka dan terus bergerak; oleh karena itu, tema tentang bangsa selalu saja menjadi menarik untuk diikuti perkembangannya. *Kedua*, proses pembakuan politik atas wacana bangsa menjadi pintu masuk bagi pertemuannya secara langsung dengan otoritas yang kemudian disebut sebagai kekuasaan. Pada saat demikian, wacana negara-bangsa (*nation-state*) tidak jarang menjadi wacana yang otoritatif sekaligus mengikat dengan kuat anggota kolektifnya. *Ketiga*, implikasi dari poin yang kedua, yaitu kepatuhan anggota kolektif tersebut terhadap wacana bangsa atau negara-bangsa tersebut. Atas dasar relasi yang otoritatif dan berbasis kepatuhan anggota kolektif tersebut, relasi antara anggota kolektif (baca: warga bangsa) dengan bangsa itu sendiri menjadi tidak seimbang. Hal tersebut pada proses perkembangannya akan menyisakan masalah.

Lebih lanjut, studi ini diawali upaya menjelaskan perkembangan konsep bangsa tersebut, mulai dengan konsepsi etnisitas yang ditempatkan sebagai bangsa (baca: etno-nasionalisme), nasionalisme Indonesia, hubungan nasionalisme dan internasionalisme, sampai dengan pascanasional-pasca-Indonesia. Dengan studi demikian ini diharapkan dapat ditelusuri jejak-jejak perkembangan nasionalisme Indonesia dari fase awalnya.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif kualitatif, untuk mendeskripsikan fenomena perkembangan kebangsaan yang terjadi di Indonesia. Dengan pendekatan sosiologi sastra, penelitian ini diarahkan untuk memahami dan merefleksikan fenomena perkembangan ideologi kebangsaan, yang dilakukan dengan cara menelusuri teks novel Indonesia dan proses berikutnya menghubungkannya dengan realitas wacana kebangsaan yang ada. Oleh karena itu, beberapa sumber data penting dipilih sedemikian rupa, yang dapat menjadi dasar akademis untuk dijelaskan sesuai dengan fokus kajian yang ada. Beberapa sumber data penting tersebut berupa novel Indonesia yang merefleksikan wacana ideologi kebangsaan. Beberapa novel tersebut, antara lain: *Student Hijo* karya Marco Kartodikromo, *Merantau ke Deli* karya HAMKA, *Maut dan Cinta* karya Mochtar Lubis, *Bumi Manusia* karya Pramoedya Ananta Toer, dan *Burung-burung Rantau* karya Y.B. Mangunwijaya. Data digali dan didedah sedemikian rupa untuk dijadikan pijakan akademis menjelaskan perkembangan kebangsaan Indonesia, mulai dari wacana etnolokalitas, sampai dengan pascanasional-pasca-Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Etnolokalitas sebagai Bangsa

Fase awal perkembangan konsep bangsa, bersentuhan dengan wacana etnisitas. Indonesia tidaklah langsung mengenal dan bersentuhan dengan konsepsi bangsa dalam struktur konsep nasionalisme modern. Wacana etnisitas mendahului proses ketika Indonesia mulai mengenal dan bersentuhan langsung dengan konsep nasionalisme modern.

Hal itu menandakan bahwa proses perkembangan konsep bangsa atau *nasion* merupakan proses yang tidak tiba-tiba. Ia dibangun atas dasar proses yang menyejarah. Terdapat sejarah panjang bagi terbentuknya konsep bangsa atau nasion itu. Suseno (2011:xxiii) misalnya membagi tiga fase perkembangan nasionalisme: *pertama*, pada fase pranasionalisme; *kedua*, fase pertumbuhan nasionalisme; dan *ketiga*, kesadaran kebangsaan yang semakin jadi.

Pada perkembangan fase awal yang disebut sebagai fase pranasionalisme, penulis lebih menyebut pada masa ini merupakan masa-masa hadirnya perasaan kebangsaan pada babak awal, ketika etnisitas dikonstruksi sedemikian rupa sebagai bangsa dalam bentuknya sendiri. Posisi etnisitas dalam perkembangan tersebut menunjuk etnolokalitas bermetamorfosis menjadi sesuatu yang diidentifikasi sebagai bangsa (baca: etno-nasionalisme). Pada fase ini, etnolokalitas baik dalam ruang sempit, maupun dalam lingkup ruang yang lebih luas dicitrakan sebagai bangsa. Konsepsi bangsa dengan demikian, dari sisi perspektif ruang mengalami proses definisi dan identifikasi yang terkadang menyempit dan terkadang mengalami perluasan ruang itu.

Hal tersebut dapat ditunjukkan ketika konsep bangsa itu secara bergantian dipakai untuk menunjuk etnisitas tertentu dan area geografi tertentu yang lebih luas sebagai bangsa. Jawa dan etnis-etnis lain di Indonesia pada masa itu, mengalami proses definisi dan identifikasi demikian. Pada saat yang sama, konsep bangsa tidak jarang digunakan pula untuk menunjuk term pribumi atau bumiputera dalam cakupan ruang yang lebih luas sebagai bangsa.

Hal itu terjadi karena terdapat konstruksi politik dan imaji historis yang tanpa sadar digunakan untuk menandai proses definisi dan identifikasi sebagai bangsa. Dalam konteks politik, baik dalam ruang yang sempit yang disebut etnolokalitas sebagai bangsa dan bumiputera atau pribumi dalam lingkup ruang yang lebih luas merupakan proses pembentukan identitas politik kebangsaan pada fase awal. Di sisi lain, hal itu diperkuat dengan imaji historis bahwa dalam lingkup ruang yang lebih luas yang disebut bangsa Bumiputera

atau pribumi (baca: Nusantara) merupakan identitas politik yang berbasis pada jejak historis yang panjang bagi bangsa ini.

Perasaan sebagai bangsa, kemudian menjadi konsep bangsa, bersentuhan dengan etnolokalitas dalam berbagai macam bentuknya dengan pihak kolonial. Dengan pernyataan lain dapat diungkapkan bahwa hadirnya konsep bangsa tersebut tidak lepas pula dari kontribusi kolonial. Ia hadir sebagai respons politik sekaligus kultural terhadap pihak kolonial. Oleh karena itu, pada fase awal lahirnya konsep bangsa, nasionalismenya antikolonial (Gandhi, 2001:138). Suatu konsepsi nasionalisme yang muncul dan efektif digunakan untuk memberikan respons berupa resistensi terhadap pihak kolonial.

Sintesis antara etnolokalitas dengan perasaan antikolonial tersebut berkembang terus untuk menemukan momentumnya dalam perjalanan sejarah. Momentum tersebut terikat oleh ruang/tempat dan waktu bagi proses yang menandai lahirnya perasaan sebagai bangsa. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa proses terbentuknya perasaan sebagai bangsa merupakan arus yang terjadi antara etnolokalitas dengan momentum sejarah yang melingkupi.

Dengan kalimat lain, dapat dinyatakan bahwa proses terbentuknya sebagai bangsa –meskipun dalam fase-fase awalnya– tidaklah bersifat tunggal. Ia banyak bersentuhan dan melibatkan kekuatan lain yang secara langsung atau tidak bersifat kontributif dengan konsep bangsa itu sendiri. Konsepsi tentang bangsa pada perkembangannya menjadi terhubung dengan kekuatan, yang bersifat sosiokultural, politik, dan historis.

Sehubungan dengan hal tersebut, di bawah ini dapat diamati bahwa identifikasi bangsa pada fase awal, juga terhubung dengan konteks sosiokultural, politik, dan historis.

Pada waktu itu bangsa Bumiputera diinjak, diperas, dan diambil kekuatan dan uangnya. Anak Bumiputera (lebih-lebih bangsa Jawa) yang biasa membedakan orang tinggi dan rendah, memandang bangsa Belanda bangsa yang tinggi, sebab mereka selalu menang perangnya (Kartodikromo, 2003:189).

“Kalau Pribumi tak punya nama keluarga memang memang mereka tidak atau belum membutuhkan dan itu tidak berarti hina. Kalau Nederland tak punya Prambanan dan Borobudur, jelas pada zamannya Jawa lebih maju daripada Nederland. Kalau Nederland sampai sekarang tak mempunyai, ya, karena tidak membutuhkannya...” (Toer, 2006:322).

“Nah, kalau kau masih Jawa, kau akan selalu bisa menulis Jawa. Kau menulis Belanda, Gus, karena kau sudah tidak mau jadi Jawa lagi. Kau menulis untuk orang Belanda. Mengapa kau indahkan benar mereka? Mereka juga minum dan makan dari bumi Jawa. Kau sendiri tidak makan dan minum dari bumi Belanda. Coba, mengapa kau indahkan benar mereka?”

“Sahaya, Bunda.”

“Apa yang kau sahayakan? Nenek moyangmu dulu, raja-raja Jawa itu, semua menulis Jawa. Malu kau kiranya kau jadi orang Jawa? Malu kau tidak jadi orang Belanda? (Toer, 2006:460).

“Benar Abang, saja bergaul dengan dia di luar nikah, tetapi hidup saja aman sentausa dengan dia. Pakaian, makan, minum saja tjukup diberinja, sehingga nasib saja tidak serupa dengan nasib kuli-kuli jang lain. Saja tidak diganggu orang lagi. Menurut timbangan saja, meskipun saja dipeliharannya di luar nikah, lebih baik saja hidup dengan dia daripada menjadi njai, karena dia masih bangsa saja juga. Lagi pula tidak ada kesalahannya kepada saja, djadi tidak ada pula sebab-sebab buat saja meninggalkannya” (HAMKA, 1959:15).

“Tidakkah Abang akan tertjela kelak oleh bangsa Abang sendiri, karena saja tahu, banjak di antara mereka jang membawa isterinja merantau kemari (HAMKA, 1959:17).

Terdapat beberapa hal yang patut dicatat sehubungan dengan perkembangan konsepsi bangsa pada fase awal, yaitu etnolokalitas dalam perspektif ruangnya yang sempit, maupun dalam perspektif ruangnya yang lebih luas bersentuhan dengan banyak hal. *Pertama*, etnolokalitas yang kemudian disebut sebagai bangsa itu bersentuhan dengan aspek sosiokultural, ketika etnolokalitas tersebut termasuk di dalamnya etnisitas dengan khasanah kulturalnya. HAMKA (1959:15; 17) dan Toer (2006:460) menunjukkan hubungan etnolokalitas bangsa tersebut dengan identifikasi etnis tertentu, yaitu dengan khasanah tradisi yang menyertainya. Jawa dan Minangkabau merupakan konstruksi dan identifikasi sebagai bangsa dalam konteks ini.

Kedua, etnolokalitas tersebut juga berhubungan dengan kekuatan politik. Hubungan tersebut tampak bersifat oposisional. Kartodikromo (2003:189) dan Toer (2006:322; 2006:460) mengintroduksi hal itu sebagai bentuk hubungan politik yang bersifat oposisi biner (*binery opposition*). Dalam konteks itu, dapat

dicermati term tentang bangsa digunakan secara bergantian untuk menunjuk etnolokalitas dalam ruangnya yang sempit, dan pada saat lain digunakan untuk menunjuk lingkup ruang yang lebih luas. Jawa sebagai etnolokalitas yang lebih sempit, dalam konteks term bangsa, berjalan bersamaan sekaligus bergantian dengan bumiputera atau pribumi untuk menunjuk pada identifikasi bangsa dalam lingkup ruang yang lebih luas.

Hadirnya hubungan politik yang bersifat oposisi biner tersebut semakin memberikan penegasan bahwa konsepsi bangsa tidak luput dari persentuhan dengan pihak di luar etnolokalitas. Bangsa bukanlah konstruksi yang tunggal; ia selalu terhubung dengan kekuatan di luar konstruksi tentang bangsa. Pihak kolonial dalam hal ini merupakan kekuatan politik luar yang secara langsung atau tidak ikut memberikan kontribusi terhadap lahirnya konsep bangsa. Fase awal konsep bangsa dengan ciri etnolokalitasnya juga tidak lepas dari konteks demikian.

Dalam posisi tersebut dapat dinyatakan bahwa konstruksi bangsa pada fase awal tidak luput juga bagi terjadinya ambivalensi dalam term bangsa itu sendiri. Satu sisi, bangsa merupakan arus kesadaran yang dipompa secara kuat bagi lahirnya ikatan perasaan sebagai bangsa. Di sisi lain, konsepsi bangsa tersebut juga diikat oleh pihak kolonial sebagai akibat dari kontribusinya terhadap lahirnya perasaan sebagai bangsa. Respons terhadap pihak kolonial menjadi babak awal bagi nasionalisme antikolonial.

Ketiga, proses politik oposisional tersebut juga terasa masih kuat ketika Kartodikromo (2003:189) dan Toer (2006:322; 460) masih membenturkan dua kekuatan; yakni, etnolokalitas Jawa, termasuk Bumiputera *vis a vis* dengan Belanda yang kolonial. Terdapat sisi historis yang ditarik, misalnya historitas raja-raja Jawa, peninggalan luhur peradaban yang ada di Jawa dan Bumiputera, serta pemanfaatan stratifikasi sosial Jawa oleh pihak kolonial, menjadi ruang historis yang memiliki kelayakan untuk dicermati.

Hal itu, bila ditilik secara lebih dalam merupakan realitas yang terjadi pada fase awal bangkitnya perasaan sebagai bangsa. Etnolokalitas masih menonjol, baik dalam kapasitasnya sebagai ruang yang otonom, maupun sebagai ruang politik yang terhubung dengan pihak kolonial. Lepas dari itu semua, fase tersebut menandai hadirnya konsep bangsa pada tataran dini.

Latif (2011:272) menyebut fenomena tersebut sebagai tumbuhnya kesadaran nasionalisme purba (*archaic nationalism*). Pada fase tersebut sebagian besar kepulauan Indonesia merupakan wilayah yang ditaklukkan

Belanda pada abad ke-19. Wilayah-wilayah tersebut tidak secara otomatis dapat diintegrasikan dalam administrasi kolonial. Pengintegrasian secara intensif baru dilakukan pada paruh kedua abad ke-19, seiring dengan kepentingan rezim liberal untuk melakukan ekspansi modal yang menuntut adanya dukungan birokrasi dan jangkauan komunikasi dalam skala yang lebih luas. Sebagai catatan, watak perlawanan rakyat Bumiputera (baca: Nusantara) terhadap proses kolonisasi juga berkembang sejalan dengan perkembangan watak administrasi dan komunikasi pihak kolonial.

Kolonisasi, menjadi titik persimpangan bagi proses reproduksi watak perlawanan bagi Bumiputera yang dikontrol dan dimobilisasi secara terus-menerus. Tokoh-tokoh imajiner seperti Hidjo, Minke, dan Nyai Ontosoroh menjadi pihak yang melakukan proses reproduksi watak perlawanan terhadap pihak kolonial secara kontinu. Pada saat yang sama, mereka membangun sentimen atas wacana bangsa pada fase awalnya. Proses kontrol dan mobilisasi perlawanan dihadirkan secara serentak dengan sentimen kebangsaan yang menghadirkan konsep bangsa dan pada saat yang sama memberikan antitesis terhadap wacana kolonisasi. Di sisi lain, kolonisasi diakui atau tidak menjadi penanda sejarah bagi proses hadirnya antitesis tersebut.

Mobilisasi politik kolonial yang semakin kuat juga diikuti semakin kuatnya mobilisasi wacana bangsa dan wacana perlawanan terhadap kolonial. Konsepsi Bumiputera dalam konteks demikian tumbuh sejalan dengan arus mobilisasi wacana bangsa tersebut. Oleh karena itu, konsepsi bangsa Bumiputera pada awalnya menjadi embrio bagi lahirnya konsepsi bangsa Indonesia. Untuk itu, istilah Bumiputera selalu dioposisibinerkan dengan Belanda atau “Barat” yang senantiasa menginjak-injak bangsa Bumiputera.

2. Nasionalisme Indonesia

Perkembangan berikutnya yang memberikan perubahan signifikan terhadap konsepsi *nasion* atau bangsa dalam tataran etnisitas (etno-nasionalisme); yakni, masuknya babak baru Indonesia yang mengenal konsepsi nasionalisme modern. Latif (2011:273) memberikan catatan bahwa pada akhir abad ke-19, Indonesia menandai babak baru dalam perkembangan nasionalisme.² Kemenangan sayap liberal yang didukung pengusaha swasta

² Bandingkan dengan konsep Latif (2011:273-305) yang memilah fase ini menjadi dua bagian; yakni, tumbuhnya nasionalisme tua (proto-nasionalisme) dan nasionalisme modern Indonesia. Penulis memasukkan dua fase tersebut menjadi satu bentuk rentangan fase nasionalisme modern Indonesia, dengan alasan, baik pada nasionalisme

dan kelas menengah di Belanda sejak 1848 membawa perubahan penting bagi kebijakan kolonial di negeri jajahan. Perubahan penting itu terkait dengan perbaikan berbagai infrastruktur dan layanan birokrasi yang secara perlahan mengantarkan wilayah-wilayah kepulauan Nusantara menuju kesatuan ekonomi dan administrasi kolonial.

Perubahan penting pada tataran perbaikan berbagai infrastruktur tersebut pada proses berikutnya memberikan implikasi bagi terbukanya sarana-sarana industri percetakan/penerbitan, organisasi sosial modern yang bercorak Eropa,³ dan tidak kalah pentingnya ialah terbentuknya jaringan institusi pendidikan yang memberikan peluang luas bagi terbukanya kemungkinan hadirnya kesadaran nasional.

Sehubungan dengan hal itu, terbentuknya jaringan institusi pendidikan bagi Belanda kolonial sebenarnya menjadi sisi yang menyisakan kebijakan dilematis. Di satu sisi, pendidikan penting untuk mendukung ekonomi-politik industrialisasi dan birokratisasi. Di sisi lain, pendidikan mengandung ancaman potensial bagi kepercayaan mistis mengenai superioritas kolonial. Penciptaan mitos superioritas kolonial tersebut dipandang sangat penting bagi Belanda untuk mengontrol subjek-subjek jajahan di tengah keterbatasan tentaranya. Anderson memberikan catatan bahwa untuk proses kolonisasi wilayah Nusantara yang begitu luas Belanda hanya memiliki tentara 40.000 orang. Jumlah tersebut jauh dari mencukupi untuk mengendalikan wilayah jajahan. Sebagai strategi alternatifnya, Belanda menciptakan mitos superior ras kulit putih yang bersifat bawaan untuk melancarkan sihir efisiensi dan misteri pengetahuan (Latif, 2011:274).

Dua variabel tersebut, yakni terbukanya industri penerbitan dan jaringan institusi pendidikan pada proses berikutnya menjadi kunci bagi terbukanya kemodernan Indonesia dalam konteks nasionalisme. Sehubungan dengan hal tersebut Anderson (2002:182) memberikan penegasan atas peran uniknya

proto, maupun nasionalisme modern, memiliki dua cirri yang sama kuat sebagai pintu masuk nasionalisme modern; yakni, persentuhannya dengan industri penerbitan dan institusi pendidikan ala Barat.

³ Lahirnya *Jong Java*, *Jong Ambon*, *Jong Islamietenbond* (Liga Pemuda Muslim) merupakan bentuk awal generasi negeri ini mengenal organisasi modern, ketika konsep organisasi belum pernah dikenal sebelumnya ketika mereka belum bersentuhan dengan bahasa Belanda. Selanjutnya lihat, Anderson (2002:181). Kemudian dalam catatan penulis berturut-turut berdiri IP, Boedi Oetomo, SI, SDI, Muhammadiyah, NU, dan PNI yang menorehkan sejarahnya masing-masing pada zaman pergerakan nasional.

sistem pendidikan (baca: persekolahan) dalam mempromosikan nasionalisme ala kolonial (Barat). Indonesia menjadi satu area bagi tumbuhnya ideologi yang pada perjalanannya mampu memberi kontribusi energi untuk menopang imaji kebangsaannya.

Nasionalisme Indonesia dengan demikian, bergerak terus mengikuti ritme zamannya. Ia tidak sekadar membangun rumah bagi nasionalisme itu sendiri, tetapi terus menggelisahkan posisinya dalam tataran nilai. Nasionalisme tidaklah dapat dibangun tanpa dasar nilai yang kokoh. Sebaliknya, ia membutuhkan pondasi nilai yang kokoh untuk meletakkan dasar-dasar konstruksi kebangsaannya. Nasionalisme yang salah konsep dan salah nilai akan memberikan akibat negatif bagi bangsa itu sendiri.

Nasionalisme Indonesia, bukanlah nasionalisme sempit yang termanifestasi dalam bentuk *jingo* nasionalisme atau *Chauvinis* yang merupakan bentuk nasionalisme barat yang mengabsahkan proses imperialisasi atas wilayah yang lain. Nasionalisme itu kemudian disebut sebagai nasionalisme imperial. Nasionalisme Indonesia di sisi lain, juga bukan bentuk nasionalisme *xenophobia*, yang implikasi praktisnya akan mendiskriminasi dan memarjinalisasi etnis atau ras tertentu.

Nasionalisme Indonesia, secara retorik menurut Lubis (1993:212) diharapkan sebagai manifestasi nasionalisme yang mengintegrasikan kemanusiaan. Dengan kalimat lain, nasionalisme Indonesia merupakan bentuk nasionalisme yang memegang prinsip-prinsip nilai kemanusiaan. Dalam konteks itu, nasionalisme mampu menjunjung tinggi martabat manusia dan bukan, memerosotkannya.

Apakah nasionalisme yang kini timbul di Asia, Afrika, Amerika Latin akan merupakan sumbangan positif ke arah integrasi hubungan manusia, atau malahan jadi daya perusak? Apakah tak ada bahaya nasionalisme ini menjadi sempit atau tumbuh jadi *sauvinisme* dan *jingoisme* serta *xenophobia*? (Lubis, 1993:212)

Nasionalisme yang terjadi di Asia, Afrika, dan Amerika Latin merupakan bentuk nasionalisme yang lahir dari respons politik dan kultural terhadap kolonial, yang merupakan bentuk nasionalisme anticolonial dan oleh Gandhi (2001:138), dikatakan memiliki motivasi perlawanan yang luar biasa terhadap segala hal yang yang dinisbatkan menindas. Hasrat perlawanan menjadi energi besar bagi nasionalisme model demikian.

Kesadaran nasional berjalan seiring dengan semangat perlawanan itu. Hasrat perlawanan yang tumbuh secara massif di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin itulah, secara implisit sangat dikhawatirkan Lubis atas kemampuannya menjadi daya perekat atau kekuatan integratif bagi manusia. Semangat perlawanan yang tidak terkontrol, pada ujungnya dikhawatirkan berubah bentuknya menjadi semangat kebencian, yang tidak jarang dihubungkan dengan etnis/ras dan agama tertentu. Kolonisasi dalam hal ini menjadi atribut politik yang dikambinghitamkan atas semangat kebencian yang dihubungkan dengan etnis/ras dan agama tertentu.

Nasionalisme Indonesia dengan demikian merupakan bentuk nasionalisme yang ideal yang tumbuh dan tegak berdiri di atas landasan nilai-nilai kemanusiaan. Nasionalisme Indonesia merupakan nasionalisme yang memberikan kontribusi bagi keadaban bagi anggota kolektifnya. Nasionalisme seperti itulah yang hakikatnya dapat memberikan kenyamanan lahir batin bagi semuanya, bukan nasionalisme yang berorientasi pada unsur-unsur bendawi, yaitu nasionalisme material dan oleh karena itu, tidak jarang melakukan banyak hal untuk ekspansi dan akuisisi material.

Nasionalisme Indonesia tidaklah nasionalisme material tetapi yang bertumpu pada nilai-nilai spiritual yang mentransendensikan seluruh ikhtiar nasion-nya pada keilahian. Oleh karena itu, nasionalisme Indonesia diharapkan menjadi sebetuk nasionalisme yang bersifat konjungtural antara wilayah yang profan dan transendental.

Sebagai nasionalisme yang berbasis kemanusiaan dan ketuhanan, tidak ada satu ruang bagi terciptanya pemusnahan dan penindasan bagi manusia lain, baik atas nama etnis/ras, agama, atau pun bangsa. Nasionalisme Indonesia pada titik demikian menjadi nasionalisme yang memberikan penghargaan dan ruang pertumbuhan bagi manusia-manusia yang ada di dalamnya, dan menggerakkan warga bangsanya menjadi warga bangsa yang martabatnya sebagai manusia.

Terdapat pernyataan yang menarik untuk disimak sehubungan dengan konsep nasionalisme Indonesia yang dikemukakan Soekarno; bahwa ia terlahir bukan sebagai konsep yang kosong yang timbul dari kesombongan bangsa belaka, melainkan sebuah nasionalisme yang luas (Sumartana, dkk., 2001:vii).

“Nasionalisme yang tersusun atas susunan pengetahuan dunia yang luas dan riwayat; ia bukanlah “jingo-nasionalisme”, atau *chauvinism* dan bukan pula suatu tiruan atau *copie* daripada nasionalisme Barat. Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang menerima rasa hidupnya

sebagai wahyu. Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang membuat kita menjadi “perkakasnya Tuhan”, dan membuat kita menjadi “hidup dalam roh”.

Pernyataan Soekarno tersebut mampu memberikan arus kesadaran konsep nasionalisme yang ideal tadi. Ia tidak hanya realitas jiwa yang semata terhubung dengan teritorial, akan tetapi, sekaligus menjadi perkakas Tuhan, karena nasionalisme dalam konteks demikian merupakan amanat Tuhan.

Lebih lanjut, nasionalisme Indonesia merupakan bentuk nasionalisme yang berbasis fakta dan nilai multikultural dan memberikan tempat yang luas dan terbuka bagi kelompok-kelompok kultural, baik berbasis agama maupun berbasis etnis/ras. Bukan sebaliknya menghadap-hadapkan antara nasionalisme itu sendiri dengan dimensi agama atau etnis/ras.

Agama dan etnis/ras dalam konteks nasionalisme tidaklah berposisi di samping atau di depan dari konsep nasionalisme. Agama dan etnis/ras dalam konteks multikultural menjadi basis bagi nasionalisme. Hal itu berarti, tidak akan ditemukan sebuah narasi nasionalisme yang sebaliknya menggerus agama dan mendesak etnis/ras pada posisinya yang paling marginal yang menjadikannya nasionalisme antikeadaban.

Nasionalisme dalam wajah demikian itu akan menjadi bentuk nasionalisme yang represif, menghisap, dan oleh karena itu menakutkan. Sejarah perkembangan nasionalisme Indonesia, pada level praksis, pernah terjadi, atas nama nasionalisme merepresi warga bangsa dengan berbagai bentuknya. Orde Baru –setidaknya dalam perjalanan sejarah ideologi di Indonesia– pernah melakukan proses represi tersebut. Hal itu dilakukan dalam bentuk yang sangat ideologis, ketika P4 dijadikan satu-satunya tafsir ideologis atas Pancasila; di sisi lain, ABRI menjadi kekuatan koersif yang sangat efektif dalam mengawal itu semua (Gerung, 2001:16).

Terdapat beberapa faktor penyebab, mengapa nasionalisme berubah menjadi represif dan menakutkan. *Pertama*, watak nasionalisme itu tidak dikonstruksi sedari awal sebagai nasionalisme yang terbuka, yang memberikan ruang bagi tumbuhnya martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, perwujudannya menjadi nasionalisme yang sempit. *Kedua*, terdapat monopoli terhadap konsep nasionalisme. Nasionalisme yang semestinya menjadi ruang tafsir terbuka, tetapi terjadi monopoli tafsir atas nasionalisme. Sebagai akibatnya, nasionalisme tersebut dikontrol, diarahkan, dan dimobilisasi kekuatannya untuk menuruti orang atau beberapa kelompok orang yang

merasa berkepentingan. *Ketiga*, pola hubungan nasionalisme yang terlalu kuat terikat dengan kekuasaan tertentu, sehingga menjadi jejaring hubungan yang searah dengan kekuasaan tersebut. Idealnya, jejaring nasionalisme terbangun dalam pola hubungan yang mengarah ke semua kelompok kultural sebagai basis utama nasionalisme.

Bila dibandingkan dengan masa Orde Lama, Soekarno lebih mengedepankan gagasan nasionalisme semacam glorifikasi. Nasionalisme memiliki substansi yang dapat diperjuangkan. Soekarno menjadikan nasionalisme sebagai proyek *nation building*, sedangkan Hatta mengedepankan nasionalisme sebagai proyek *state building* dengan memanfaatkan *nation state* yang ditinggalkan oleh kolonial dan mau diatur dengan cara-cara konstitusional (Gerung, 2001:15).

3. Nasionalisme dan Internasionalisme

Nasionalisme Indonesia bersifat terbuka dan tumbuh menjadi ideologi yang tidak hanya menghidupi dirinya sendiri, akan tetapi mampu menghidupi lingkungannya. Seiring dengan itu, ideologi tersebut mampu pula berinteraksi dengan konteks ideologi di luar dirinya. Nasionalisme Indonesia diniscayakan memiliki kemampuan itu. Ia tidak mungkin mengungkung dirinya dalam suatu ruang sosial, politik, dan kultural yang sama sekali terpisah. Ia juga tidak mungkin mengeksklusi dirinya. Sebaliknya, ia diniscayakan memiliki kesanggupan untuk menjalin relasi ideologis yang terbuka dengan ideologi lain di luar dirinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembahasan relasi nasionalisme dan internasionalisme dapat diletakkan dalam konteks. Nasionalisme harus tumbuh dewasa dan bersamaan dengan hal itu, mampu menjalin hubungan yang baik dengan internasionalisme. Menjalinkan hubungan yang baik dengan internasionalisme tersebut dengan suatu pengandaian bahwa nasionalisme itu bukanlah nasionalisme tanpa baju, tanpa identitas. Sebaliknya, dalam relasinya dengan internasionalisme, nasionalisme tersebut diniscayakan memiliki identitas yang baik dan kokoh.⁴ Asumsi ideologisnya ialah tidak dimungkinkan dalam suatu pergaulan internasional –apalagi ini dalam konteks pergaulan dengan ideologi lain– ia tidak dilandasi dengan identitas ideologis yang baik dan kokoh.

⁴ Term *baik* dalam konteks ini dimaksudkan oleh penulis bahwa ideologi tersebut memiliki kesesuaian dengan konteks sosiokultural di tempat ideologi itu tumbuh dan berkembang. Sedangkan, term *kokoh* dimaksudkan oleh penulis bahwa konstruksi ideologi itu dibangun di atas landasan nilai dan struktur ideologi yang kuat.

Nasionalisme Indonesia harus menjadi suatu konstruksi ideologi yang baik dan kokoh itu. Secara intrinsik, ideologi tersebut perlu terus direvitalisasi agar ia hidup sebagai ideologi yang sehat dan tidak terjebak menjadi ideologi represif. Ia harus terus dipupuk untuk hidup dan menghidupi anggota kolektif ideologisnya. Bersamaan dengan hal itu, ideologi tersebut mampu mengembangkan diri ke arah perjalanan bangsa yang lebih dinamis dan progresif.

Secara ekstrinsik, nasionalisme Indonesia dalam konteks interaksi ideologisnya dengan dunia luar, ia harus menjadi ideologi yang mampu menyerap dan menerima unsur-unsur positif dari ideologi yang lain. Hal tersebut perlu dilakukan, karena ideologi besar dunia yang sampai sekarang masih eksis pun menyerap unsur-unsur positif dari ideologi lain. Tidak ada ideologi di dunia ini tanpa harus menyerap dan menerima unsur positif dari ideologi lain. Ideologi sebesar dan sedigdaya seperti kapitalisme pun pada akhirnya harus menyerap dan menerima unsur-unsur positif ideologi lain. Dalam hal ini ideologi sosialisme, yang berkembang sebagai penyerapan atas ideologi lain tersebut oleh Giddens (2000:74) disebut *the third way*, yakni jalan ketiga setelah jalan pertama kapitalisme dan jalan kedua sosialisme. Tujuan politik jalan ketiga membantu para anggota masyarakat merintis jalan mereka melalui revolusi utama, yaitu globalisasi, transformasi dalam kehidupan personal, dan sekaligus berhubungan dengan alam.

Dalam konteks hubungannya dengan internasionalisme, Soekarno pun pernah memberikan pandangan penting berkaitan dengan hal tersebut, yakni tumbuhnya Indonesia sebagai negara merdeka. Ia harus tumbuh bersama “kekeluargaan bangsa-bangsa”. Konsep itulah yang kemudian disebut oleh Soekarno sebagai “internasionalisme” (Latif, 2011:125). Sebagai catatan, Soekarno memberikan batas-batas konsep internasionalisme itu bukan sebagai kosmopolitanisme yang ia pandang sebagai konsep ideologis yang menolak kebangsaan.

Sehubungan dengan hal itu, Lubis (1993:212) juga memberikan ilustrasi yang tidak jauh dari apa yang dinyatakan oleh Soekarno, bahwa nasionalisme Indonesia harus tumbuh seiring dengan internasionalisme. Lubis secara lugas memberikan penegasan bahwa seorang nasionalis yang baik, juga merupakan internasionalis yang baik pula. Untuk yang terakhir, yang dimaksud tentunya bukanlah komunisme sebagai ideologi internasional.

Bukankah kini seorang nasionalis yang baik harus pula seorang internasionalis yang baik? Yang selalu mempertimbangkan kepentingan

umum dunia di samping kepentingan negerinya sendiri? Jika kita menghendaki internasionalisme yang baru yang macam apa? Tentu bukannya internasionalisme komunisme yang tak lain akan berarti perbudakan dunia di bawah satu sistem totaliter (Lubis, 1993:212).

Terdapat catatan penting sehubungan dengan pernyataan ideologis Soekarno dan Lubis. *Pertama*, kedua tokoh tersebut mencoba menyandingkan secara mesra nasionalisme (baca: nasionalisme Indonesia) dengan internasionalisme. Keduanya membangun “kesepakatan” atas pentingnya kehadiran internasionalisme di tengah pertumbuhan nasionalisme Indonesia. *Kedua*, dua tokoh tersebut memberikan konsep yang senada bahwa internasionalisme tersebut berlaku dalam konteks pergaulan bangsa-bangsa dunia. Oleh karena itu, membangun prinsip humanisme universal dipandang penting. *Ketiga*, dua tokoh tersebut pada ujungnya memberikan catatan pengecualian yang berbeda.

Soekarno memberikan catatan pengecualian terhadap hadirnya ideologi kosmopolitanisme yang kontraproduktif dengan nasionalisme karena dipandang menolak kehadiran nasionalisme. Di sisi lain, Lubis memberikan catatan pengecualian terhadap ideologi komunisme, bertentangan dengan prinsip-prinsip humanitas. Komunisme dalam tataran praksis ideologisnya cenderung melakukan perbudakan dan penindasan kemanusiaan di bawah satu sistem politik kekuasaan yang bersifat totaliter.

Titik persimpangan ideologis antara Soekarno dan Lubis tersebut memberikan implikasi politik bagi keduanya. Terdapat pilihan rasional yang dilakukan kedua tokoh tersebut. Soekarno secara tegas memberikan catatan pengecualian terhadap hadirnya ideologi kosmopolitanisme karena mengasumsikan manusia pada dasarnya tidak terikat ruang tertentu. Manusia memiliki ruang yang bebas untuk hidup di mana saja dan kapan saja di dunia ini. Oleh karena itu, dalam prinsip kosmopolitanisme, menjadi warga dunia tanpa tersekat oleh batas-batas bangsa dan negara merupakan hal yang diobsesikan. Atas dasar itu pula, diduga kuat Soekarno melakukan penolakan atas ideologi kosmopolitanisme tersebut.

Di sisi lain, Soekarno tidak begitu tegas bahkan tidak menyinggung relasi nasionalisme Indonesia dengan komunisme. Seolah Soekarno sengaja tidak menyatakan secara eksplisit terhadaba bahaya dari komunisme internasional, bila dilihat dari praksis ideologisnya yang cenderung bersifat totaliter. Lefort misalnya menggunakan term totalitarianisme sebagai istilah umum yang

meliputi rezim fasis dan komunis. Memang, terdapat perbedaan konsep di antara keduanya; akan tetapi, kedua tipe tersebut dikarakterisasikan satu wacana yang mengklaim untuk mengekspresikan pengetahuan universal dan melindungi unitas dan homogenitas sosial. Wacana totalitarianisme lebih lanjut tidak mengakui oposisi yang digunakan ideologi borjuis selain untuk memanipulasi pembagian sosial (*social division*) (Thompson, 2003:51).

Lebih lanjut, ada sesuatu yang disembunyikan, yakni hubungan Soekarno secara pribadi dengan tokoh-tokoh komunisme internasional, baik dengan poros Beijing maupun dengan poros Rusia. Hubungan secara pribadi tersebut memberikan pengaruh politik terhadap dinamika ideologi secara nasional. Terhitung sejak 1960-an Soekarno terlihat dekat secara politik dengan Blok komunis daripada Blok Barat yang dipimpin AS.⁵

Kedekatan politik itu terutama terjadi dengan Uni Soviet, yang memang dalam sejarah hubungan dua negara tersebut, Soviet termasuk negara yang ikut memberikan bantuan kepada RI. Sejak 1 Oktober 1958 jumlah bantuan ekonomi yang diberikan Soviet senilai US\$ 200 juta. Sedangkan di bidang militer bantuan Soviet sebesar US\$100 juta. Hal tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan protokol oleh Indonesia-Soviet tentang pemberian bantuan teknis dan kredit US\$117,5 juta, belum lagi terhitung dengan bantuan 400 ahli ekonomi dan teknisi militer untuk republik ini (Soyomukti, 2012:79).

Di samping itu, obsesi politik Soekarno yang jauh-jauh hari ingin menyatukan tiga kekuatan penting secara nasional, akan terhambat bahkan gagal bila diungkapkan secara eksplisit. Tiga kekuatan politik penting secara nasional tersebut ialah Nasionalisme (PNI), Agama (NU), dan Komunis (PKI), yang kemudian disingkat NASAKOM. Soekarno merasa berkepentingan atas tiga basis kekuatan politik utama tersebut. Oleh karena itu, Soekarno berusaha menghindari semaksimal mungkin faktor-faktor yang dapat menyebabkan renggangnya hubungan dengan tiga kekuatan tersebut, termasuk dengan kekuatan komunis.

Di pihak lain, Lubis memberikan catatan yang tegas terhadap pengecualian pada ideologi komunisme yang dipandang tidak layak digauli dalam konteks

⁵ Salah satu sebab kedekatan dengan Soviet tersebut ialah bahwa Soekarno pernah tersinggung dan dikecewakan oleh Presiden AS Eisenhower, ketika pada 6 Oktober 1960 Presiden Soekarno secara informal menemui Presiden AS tersebut ke Washington. Eisenhower tidak menyambutnya di depan pintu Gedung Putih; bahkan Presiden Soekarno terpaksa menunggu di ruang tunggu dalam waktu yang relatif lama. Melihat hal ini, Presiden Soekarno merasa kecewa berat dan merasa dipermalukan. Lebih lanjut, lihat Soyomukti (2012:79).

interaksi ideologis internasional. Ada dugaan penting, yang perlu diungkapkan bahwa hubungan Lubis dengan Soekarno kurang begitu baik. Terlebih sikap Lubis yang begitu tegas terhadap ideologi komunisme tersebut. Dalam konteks ideologi tersebut, menurut pernyataan Lubis (1993:212) dapat diletakkan dalam konteks kritik tajam terhadap pandangan ideologi politik Soekarno.⁶

Sepintas lalu, wacana pergaulan ideologis nasionalisme Indonesia dalam konteks ideologi internasional tidak menemukan masalah. Masalah baru yang tidak kalah krusial –yang mau tidak mau– harus berinteraksi dengannya, yakni ideologi pasar (Laksono, 2001:8). Nasionalisme Indonesia pada level praktisnya dituntut mampu menjelmakan kekuatan ideologi tersebut dalam tataran ekonomi ketika berhadapan dengan ideologi pasar dunia. Hadirnya negara-negara industri negara maju dan negara-negara industri baru *new industrial countries* seperti Jepang, Korea, dan Cina tidak dapat diletakkan.

Di samping itu, yang tidak kalah krusialnya ialah hadirnya wacana ideologi internasional baru berbasis agama, yang dikhawatirkan menggerus nasionalisme.⁷ Oleh karena itu, tantangan interaksi ideologis nasionalisme Indonesia tetap terjadi dan tataran praksis tidak kalah krusial dan kompleks. Hubungan nasionalisme dan internasionalisme meskipun demikian, tetap penting dilakukan secara terbuka; bersamaan dengan hal itu menjunjung tinggi sikap kehati-hatian ideologis dalam konteks hubungan tersebut.

4. Pascanasional-Pasca-Indonesia

Nasionalisme sebagai proyek ideologi memang bukanlah sesuatu yang mati dan final, tetapi selalu bergerak dinamis secara terus-menerus dan beradaptasi dengan konteks ruang dan waktunya. Ada proses negosiasi yang dilakukan secara terus-menerus oleh ideologi. Bersamaan dengan hal itu, proses redefinisi, reinterpretasi, dan rekontekstualisasi ideologi tidak dapat dielakkan. Keniscayaan bahwa ideologi harus didefinisikan, ditafsirkan, dan dikontekstualisasikan ulang sesuai dengan arus zaman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari.

⁶ Perlu diketahui bahwa novel *Maut dan Cinta* ditulis Mochtar Lubis dalam penjara rezim soekarno di Madiun, tidak lama sebelum *coup* Gestapu PKI pecah. Lubis baru dibebaskan pada 18 Mei 1966. Meskipun demikian, novel ini mengalami nasib untuk tidak dapat diteruskan. Baru pada musim panas 1973 novel ini diteruskan di *Aspen Institute* Amerika Serikat.

⁷ Hadirnya wacana khilafah yang diusung oleh salah satu Ormas Islam HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) perlu mendapat perhatian secara saksama.

Ideologi dalam konteks demikian tidak boleh ada stagnasi yang pada ujungnya mengakibatkan ideologi itu akan mati karena ditinggalkan oleh penganut-penganutnya. Oleh karena itu, mendialogkannya secara terus-menerus merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Tidak terkecuali dalam hal ini, nasionalisme Indonesia dalam posisinya sebagai proyek ideologi. Sebagai proyek ideologi, nasionalisme perlu didialogkan dalam konteks memperbesar kapasitas ideologisnya di tengah masyarakat Indonesia yang terus bergerak dan berubah.

Sehubungan dengan hal itu nasionalisme sebagai proyek ideologi diasumsikan terhubung dengan proyek keindonesiaan. Oleh karena itu, mendialogkan kembali konteks ideologis tadi, sebenarnya dalam rangka mendialogkan keindonesiaan tersebut. Hal itu dilakukan dengan cara mendefinisikan, menafsir, dan mengontekstualisasikan ulang keindonesiaan tersebut dalam konteks tempat dan zamannya.

Dari sisi tempat atau lokus teritori, keindonesiaan tidaklah dapat dipandang dan diposisikan sebagai sesuatu yang baku dan final, dimungkinkan terjadi perubahan imaji bagi lokus teritorial tadi. Batas-batas imajiner keindonesiaan juga sering menjadi sesuatu yang relatif abstrak. Dalam premis demikian ini, identifikasi keindonesian tidak dapat dibatasi dengan lokus teritorial tersebut. Dalam konteks tersebut, lokus teritorial tetap menjadi penting; akan tetapi, tidak dapat dijadikan satu ukuran untuk menentukan keindonesiaan.

Bila hal tersebut dihubungkan dengan konteks ideologis, secara ekstrem orang-orang yang tidak berada dalam lingkup teritorial Indonesia disebut tidak nasionalis. Pandangan tersebut merupakan kecelakaan dalam perspektif ideologis. Nasionalisme dalam konteks proyek ideologis perlu dikembalikan kepada esensi dasar ideologisnya, yaitu merupakan konsep yang menunjuk bentuk-bentuk keterikatan secara imajiner dengan apa yang disebut dengan keindonesiaan tersebut, melampaui batas-batas teritorial.

Nasionalisme Indonesia juga demikian, ia tidak hanya dapat diidentifikasi dengan menunjuk pada lokus teritorial. Dalam konteks ideologis, lokus teritorial sering tidak bersifat permanen. Faktor politik tidak jarang dapat menyebabkan hal demikian. Sebaliknya, bentuk-bentuk keterikatan secara imajiner itu cenderung bersifat permanen. Hal itu berarti pada konteks lokus teritorial dapat bergeser, berubah, atau terpisah, akan tetapi, bentuk-bentuk keterikatan imajiner dengan apa yang disebut nasion Indonesia cenderung bersifat permanen.

Oleh karena itu, pembahasan tentang pascanasional-pasca-Indonesia menjadi menarik untuk didiskusikan. Oleh Mangunwijaya (1999:41) hal itu dikatakan sebagai konsep yang menunjuk kontinuitas dan diskontinuitas sekaligus dengan term nasional dan term Indonesia.⁸ Lebih lanjut, di bawah ini Mangunwijaya memberikan ilustrasi dalam novel *Burung-burung Rantau*.

Neti tersenyum, Dua abang ia punyai, tetapi sama sekali berlainan. Yang satu pilot, manusia praktis dari dunia terapan yang dalam sikap dan ideologinya sungguh nasional totok fanatik, kendati luar Indonesia bukan wilayah asing baginya. Sedangkan abang satunya ini adalah orang yang kegemarannya terbang melintasi batas-batas nasional kemudian lebur dalam suatu dunia serba baru yang iklim serta cita-citanya pascanasional, yakin merasa diri sudah lepas dan mengatasi ikatan-ikatan wilayah tanah kelahirannya. Dari warga tertentu menjadi warga negara planet Bumi, bahkan warga intergalaksi (Mangunwijaya, 1992:292–293).

Mangunwijaya memberikan satu persoalan yang mestinya dipecahkan dalam konteks nasionalisme dan keindonesiaan yang terus bergerak. Realitas terjadinya hilir-mudik warga bangsa ini melampaui batas-batas teritorial Indonesia dan bersamaan dengan itu pula interaksi atau pergaulan global secara intensif terjadi, mau tidak mau, memberikan arus perspektif baru bagi realitas dan cara bangsa ini berideologi.

Dalam konteks itu, meskipun Mangunwijaya memberikan pengakuan secara jujur masih hadirnya nasionalisme fanatik yang direpresentasikan oleh Candra salah satu kakak Neti. Di sisi lain, Bowo kakak Neti yang satunya direpresentasi sebagai tokoh yang memiliki pandangan pascanasional. Dua kategori, baik dalam perspektif dan cara berideologi ditampilkan secara relatif bersamaan oleh Mangunwijaya. Dalam konteks ideologi nasional diharapkan terdapat ruang perspektif dan dialogis yang berjalan. Neti diposisikan oleh pengarang sebagai pihak yang memfasilitasi hilir mudiknya ideologi tersebut.

Lebih lanjut, bangsa ini dalam konteks perspektif dan cara berideologi, juga harus mengalami proses perkembangan. Perlu dihadirkan sikap adaptasi dalam melihat realitas perkembangan ideologis. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak penting lagi memperdebatkan Timur atau Barat. Generasi muda kini dan

⁸ Mangunwijaya membedakan kategori makna antara istilah *post* dengan istilah *pasca*. Istilah *post* menunjuk arti sesudah, belum menyatakan kontinuitas dan diskontinuitas, sedangkan istilah *pasca* menunjuk kontinuitas dan diskontinuitas tersebut. Lebih lanjut, lihat Mangunwijaya (1999:41).

mendatang, menurut Mangunwijaya (1999:75) merupakan generasi pasca-Timur dan Barat, bahkan mulai tampak kuncup-kuncup pasca-Indonesia.

Lebih lanjut Mangunwijaya (1999:58) dengan kritiknya yang tajam menyatakan bahwa memperdebatkan wacana internasionalisme dan kosmopolitanisme sebagai sesuatu yang kurang memuaskan karena sudah terlanjur ternoda oleh iklim keangkuhan elite dunia yang tidak menghargai, bahkan menyingkirkan kemanusiaan dalam internasionalisme korporasi (korporasi multinasional) yang serba tega. Tema pasca-Indonesia dengan demikian dipandang lebih relevan digunakan.

Hal tersebut jelas berbeda dengan Lubis dan Soekarno yang masih asyik memperdebatkan wacana internasionalisme dan kosmopolitanisme. Nasionalisme Indonesia sudah bergerak jauh melampaui batas imajiner kalangan tua yang cenderung konservatif yang dibutuhkan sesuai dengan konteks zamannya. Hal itu berarti kebermaknaan ruang imajinatif atas konstruksi ideologi yang dibayangkan juga sesuai dengan konteks zamannya.

Satu hal yang masih relevan dan terdapat koneksitas, sekaligus kontinuitas, yakni menurut Soekarno, Lubis, dan Mangunwijaya merepresentasi realitas ideologis generasi muda saat ini dan mendatang, bahwa nasionalisme yang didorong dan diagungkan bukanlah nasionalisme yang menyendiri di antara bangsa-bangsa lain. Nasionalisme Indonesia ialah nasionalisme yang terbuka dan memiliki kesediaan untuk bergaul secara harmonis dan setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

D. Simpulan

Bertolak dari analisis yang sudah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskursus tentang bangsa, dalam kapasitasnya sebagai ideologi dan wacana tidaklah dapat dibaca dan dipahami secara parsial. Ia berkaitan dengan jejaring wacana yang kompleks, berhubungan dengan dinamika, kontinuitas, dan diskontinuitas kebangsaan. Oleh karena itu, konsep bangsa perlu dibaca, dilihat, dan diposisikan dalam konteks dinamika, kontinuitas, dan diskontinuitas.

Realitas hadirnya fase etnolokalitas sebagai etnonasionalisme, nasionalisme dalam konstruksi keindonesiaan, hubungan nasionalisme dan internasionalisme, sampai dengan pascanasional-pasca-Indonesia mendorong kesadaran diskursif bahwa diskursus tentang bangsa, dalam kapasitasnya sebagai ideologi dan wacana terus saja bergerak. Oleh karena itu, dibutuhkan

cara pandang yang terbuka untuk melihat dan memosisikan diskursus bangsa itu dalam konteks konsepsi kebangsaan yang selalu berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Althusser, L. 1969. *For Marx*. London: Allen Lane.
- Anderson, Benedict. 2002. *Imagined Communities: Komunitas-komunitas Terbayang*. Diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Insist-Pustaka Pelajar.
- Barker, Chris. 2005. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Bentang, terjemahan oleh Tim Kunci Cultural Studies Center, dari judul asli *Cultural Studies: Theory and Practice*. Sage Publication-London, 2000.
- Barry, Peter. 2010. *Beginning Theory: Pengantar Komprehensif Teori Sastra dan Budaya*. Yogyakarta Jalasutra. Terjemahan oleh Harviah Widiawati dan Evi Setyarini, Judul asli, *Beginning Theory: an Introduction to Literary and Cultural Theory*. Manchester: Manchester University Press, 2005.
- Gandhi, Leela. 2001. *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat*. (terj. Yuwan Wahyutri dan Nur Hamidah). Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Gerung, Rocky. 2001. "Globalisasi, Etnisitas, dan Tantangan Konsep Nasionalisme." Dalam Sumartana, Th. dkk. (ed.). 2001. *Nasionalisme Etnisitas: Pertaruhan Sebuah Wacana Kebangsaan*. Yogyakarta: DIAN/ Interfidei, Kompas, dan Forum Wacana Muda.
- Giddens, Anthony. 2000. *The Third Way: Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*. (terjemahan Ketut Arya Mahardika). Jakarta: Gramedia.
- HAMKA. 1959. *Merantau ke Deli*. Jakarta: Penerbit Djajabakti.
- Kartodikromo, Marco. 2003. *Student Hidjo*. Yogyakarta: Yayasan Aksara Indonesia.
- Laksono, P.M.,. 2001. "Globalisasi, Etnisitas, dan Tantangan Konsep Nasionalisme." Dalam Sumartana, Th. dkk.(ed.). *Nasionalisme Etnisitas: Pertaruhan Sebuah Wacana Kebangsaan*. Yogyakarta: DIAN/ Interfidei, Kompas, dan Forum Wacana Muda.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Lubis, Mochtar. 1993. *Maut dan Cinta*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Mangunwijaya, Y.B. 1992. *Burung-burung Rantau*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Mangunwijaya, Y.B. 1999. *Pasca-Indonesia Pasca-Enstein: Esai-esai tentang Kebudayaan Indonesia Abad ke-21*. Yogyakarta: Kanisius.
- Simon, Roger. 1999. *Gramsci's Political Thought: An Introduction*. London: Elecbook.
- Soyomukti, Nurani. 2012. *Soekarno dan Cina: Nasionalisme Tionghoa dalam Revolusi Indonesia, Soekarno dan Poros Jakarta-Peking, sikap Bung Karno terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia*. Yogyakarta: Garasi.
- Sumartana, Th. dkk. 2001. *Nasionalisme Etnisitas: Pertaruhan Sebuah Wacana Kebangsaan*. Yogyakarta: DIAN/Interfidei, Kompas, dan Forum Wacana Muda.
- Suseno, Franz Magnis. 2011. "Tambang Emas Bagi yang Ingin Mengerti Indonesia." Dalam Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Thompson, John B. 2003. *Analisis Ideologi: Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia*. Terjemahan Haqqul Yaqin dari *Studies in the Theory of the Ideology*. Yogyakarta: IRCiSol.
- Toer, Pramoedya Ananta. 2006. *Bumi Manusia*. Jakarta: Penerbit Lentera Dipantara.